



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

**HUBUNGAN EFEKTIFITAS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
PENGENDALIAN INTERN DENGAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN:
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

**(Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota
Wilayah Propinsi Jawa Barat)**

Aristanti Widyaningsih

Alvian Triantoro

(Universitas Pendidikan Indonesia)

Lili Sugeng Wiyantoro

(Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Abstract

The objective of this research is to analyze the relationship of effectiveness of regional financial accounting system and internal control system and the quality of financial accountability, with the quality of information of financial report as intervening variable.

This research uses the survey method. The population of this research is all of 26 district/municipal city in West Java, and the sample is saturated sampling. The analysis method used is path analysis, with the effectiveness of regional financial accounting system, internal control system, and the quality of information of financial report as independent variables, and the quality of financial accountability as dependent variables.

The result of the analysis shows: (1) a strong relationship between effectiveness of regional financial accounting system and internal control system, and that the effectiveness of regional financial accounting system has a significant influence on internal control system (2) a moderate relationship between effectiveness of regional financial accounting system and internal control system with the quality of information of financial report. The regional financial accounting system has a significant and direct influence on the quality of information of financial report, also a significant and indirect influence on the quality of information of financial report through the internal control system; (3) a strong relationship between a moderate relationship between effectiveness of regional financial accounting system and internal control system with the quality of financial accountability. The regional financial accounting system has a positive, significant and direct influence on the quality of financial accountability, also a significant and indirect influence on the quality of financial accountability through the quality of information of financial report; and the internal control system has a significant, and direct influence on the quality of financial accountability, also a significant, and indirect influence on the quality of financial accountability through the quality of information of financial report.

Keyword: *effectiveness of regional financial accounting system, internal control system the quality of financial accountability, the quality of information of financial report.*

1. Latar Belakang



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Penyempurnaan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 telah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparansi, partisipatif dan bertanggungjawab. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008: 2).

Saat ini, belum sepenuhnya aparatur pemda menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, telah diubah kembali dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 17 tahun 2007 yang mengatur bagaimana wewenang, hak dan kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan "modern" dan penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pada Semester II Tahun 2008, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

2007 pada **191** pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam tahun 2008 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 466 LKPD Tahun 2007 dari 469 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2007.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan sehingga pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib. Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengawasan oleh Badan Pengawas provinsi/kabupaten/kota belum optimal dan sering dijumpai temuan-temuan BPK yang berulang dan lambat ditindaklanjuti (BPK, 2009).

Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi akuntansi yang usang dan tidak akurat akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Aribowo, 2007).

Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (reliable information) yang sangat diperlukan untuk



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan (Mohamad, 2004: 277).

Masalahnya adalah apakah akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian Surya (2004) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas. Sedangkan hasil penelitian Nurhayati (2004) menunjukkan adanya pengaruh yang besar penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkajinya melalui suatu penelitian dengan judul: **Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Melalui Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening.**



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

2. Hubungan antar Variabel dan Hipotesis

2.1. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern

Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan pengendalian intern secara tegas dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa penilaian atas Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan:

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

Mulyadi (2001: 163) mengatakan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern. Sedangkan Gillespie (1985: 188) menyatakan bahwa "*internal checks are "measure and methods" built into an accounting system to check the accuracy of accounting and safeguard the assets of the company*". Sistem akuntansi disusun dengan maksud untuk: (1) *Cost effective*; (2) *useful output*; dan (3) *internal control* (Weygant et al., 2005: 85-89; Warren et al., 2005: 80-86).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern dibentuk setelah adanya sistem akuntansi.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Sistem pengendalian akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem akuntansi yang berjalan secara efektif. Dengan demikian, tingkat efektifitas penerapan sistem akuntansi dapat menentukan berjalan tidaknya sistem pengendalian intern dengan baik.

Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan:

H1: semakin efektif penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan menyebabkan semakin baik sistem pengendalian intern dijalankan

2.2. Hubungan sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Hall (2004: 151) mengungkapkan bahwa, "*The quality of information generated by the accounting information system impacts management's ability to take actions and make decisions in connection with the organization's operations and to prepare reliable financial statements*". Sedangkan Mulyadi (2001: 19) mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004: 34).

Hal ini sejalan dengan pendapat Darise (2008:2) yang menyatakan bahwa keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai. Hal serupa diungkap oleh Mulyadi (2001: 19) bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dapat dirumuskan:

H2: sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

2.3. Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah (2000: 11) adalah:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik;
- b. Manajerial
informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.
- c. Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menurut PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah pula dikemukakan tujuan pelaporan keuangan,



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

yaitu bahwa pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dengan cara:

1. penyediaan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. penyediaan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan.
3. penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pemerintah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

Tujuan pertanggungjawaban (Halim, 2007: 35) adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hipotesis yang selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin efektif dan pengendalian intern yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan melalui informasi laporan keuangan yang berkualitas.

3. Metode Riset

3.1. Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Sedangkan periode waktu yang digunakan adalah *cross sectional* yaitu fakta sesaat berupa data yang hanya dapat digunakan sekali dalam suatu periode pengamatan.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sn14aceh.com

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemda kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 26 kabupaten/kota. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah (Pemda) di kabupaten/kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sedangkan unit observasi yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Inspektorat di kabupaten/kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Kuesioner didistribusikan ke seluruh Inspektorat masing-masing kabupaten/kota wilayah propinsi Jawa Barat. Alasan ditetapkannya inspektorat sebagai unit observasi adalah berkaitan dengan variabel yang diteliti. Permendagri No. 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Nama kabupaten/kota di Jawa Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1 di lampiran.

Tabel 1

3.3. Pengukuran Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dipahami konsep operasional dan indikator variabel penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2 di lampiran.

Tabel 2

3.4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 menggunakan teknik Analisis Jalur (*Path Analysis*), dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_{YX_1} X_1 + \beta_{YX_2} X_2 + \varepsilon_2$$
$$Z = \beta_{ZX_1} X_1 + \beta_{ZX_2} X_2 + \beta_{ZY} Y + \varepsilon_3$$

Mengenai analisis jalurnya (*Path Analysis*) dapat dilihat pada gambar 2 di lampiran.

Gambar 1

4. Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Responden

Kuesioner yang dikirimkan berjumlah 26 eksemplar dan yang kembali dan dapat digunakan berjumlah 26 eksemplar sesuai dengan jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat, sehingga tingkat pengembalian yang digunakan adalah sebesar 100%. Penyampaian kuesioner kepada responden dilakukan secara langsung. Mengenai profil responden penelitian dapat dilihat pada tabel 3 di lampiran.

Tabel 3

4.1.2. Uji Validitas

Hasil dari uji validitas menunjukkan ke empat variabel rata-rata valid yang dapat dilihat pada tabel 3 di lampiran. Untuk menguji reliabelitas digunakan *cronbach alpha* (α), suatu kuesioner reliabel bila nilai *cronbach alpha* nya lebih dari 0,6 (Nunnally, 1994) dalam Ghozali (2005). Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan ke empat adalah reliabel yang dapat dilihat pada tabel 4 di lampiran.

Tabel 4
Tabel 5

4.1.3. Uji Normalitas

Dari hasil pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov tersebut dapat dilihat bahwa α untuk semua variabel $\alpha > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada semua variabel berdistribusi normal. Pengujian dapat dilihat pada tabel 6 di lampiran.

Tabel 6

4.1.4. Pengujian Hipotesis

Dari hasil perhitungan secara manual maupun dengan menggunakan program komputer (SPSS 16) diperoleh bahwa hipotesis 1 (H1) hubungan kedua variabel efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) dan sistem pengendalian intern (X_2) adalah sebesar **0,74146**. Ini berarti bahwa variabel (X_1) dan (X_2) berkorelasi kuat. Uji-t yang didapat ini dibandingkan dengan $t_{0,95;24} = 2,063899$. Uji-t



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

mengungkapkan bahwa t -hitung $>$ dari t -tabel = $5,413428 > 2,063899$; artinya koefisien jalur signifikan dan hipotesis (H_1) diterima.

Untuk mengungkapkan pengaruh efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), secara simultan dan secara parsial, langsung dan tidak langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y). Pengujian hipotesis, statistik uji yang digunakan adalah uji- F , dan untuk pengujian secara individu digunakan uji- t . Uji- F yang didapat ini dibandingkan dengan $F_{0,05;2;24} = 3,027998$. Uji- F ini mengungkapkan bahwa F -hitung $>$ dari F -tabel = $21,67088 > 3,027998$, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Hasil output dari hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 7 dan 8 di lampiran.

Tabel 7
Tabel 8

Hipotesis ketiga bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), secara simultan dan secara parsial, langsung dan tidak langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Y). Untuk menguji hipotesis, statistik uji yang digunakan adalah uji- F , dan untuk pengujian secara individu digunakan uji- t . Uji- F yang didapat ini dibandingkan dengan $F_{0,05;2;22} = 3,049125$. Uji- F ini mengungkapkan bahwa F -hitung $>$ dari F -tabel = $30,67284 > 3,049125$, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hasil dari output hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 9 dan 10 di lampiran.



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Tabel 9

Tabel 10

Hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil output analisa Jalur (*Path Analysis*) pada gambar 2 di lampiran, sedangkan rangkuman hasil koefisien jalur dapat dilihat pada tabel 11 di lampiran dan hasil hubungan langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel 12 di lampiran.

Gambar 2

Tabel 11

Tabel 12

4.2. Pembahasan Hipotesis

4.2.1. Hubungan Kausalitas Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren et all (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (internal control).

Diterimanya hipotesis yang pertama ini sekaligus mendukung teori yang diungkap oleh Gillespie (1985), dan Mulyadi (2001), yang menyatakan bahwa pengendalian intern terbentuk melalui sistem akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi bertujuan untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin efektifnya sistem akuntansi keuangan daerah menyebabkan sistem pengendalian intern dapat berjalan semakin baik.

4.2.2. Hubungan Kausalitas Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengendalian internal (internal control) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi. Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu proses yang dijalankan, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang dipenuhinya tujuan pengendalian. Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan risiko. Weygandt et al (2005) mengungkapkan bahwa: "Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).

4.2.3. Hubungan Kausalitas Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Melalui Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Pengaruh langsung variabel efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas akuntabilitas keuangan dapat diartikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan dengan efektif secara statistik dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun apabila melihat pengaruh efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah secara tidak langsung terhadap kualitas akuntabilitas keuangan melalui kualitas informasi laporan keuangan dapat diartikan bahwa sistem akuntansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah dan kinerjanya, menyediakan informasi untuk keperluan manajerial, transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Selain itu diharapkan juga bahwa sistem akuntansi pemerintah dapat membuat pusat-pusat pertanggung jawaban pada pemerintahan mampu membuat dan menyiapkan laporan keuangan yang cepat, akurat dan lengkap yang memenuhi akuntabilitas sebagaimana yang diamanahkan.

Sistem akuntansi merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi Pemda melalui pemrosesan data keuangan, mulai dari



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

catatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Hal ini menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh kabupaten/kota di Jawa Barat, berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi. Tentu saja masalah tersebut berdampak pada efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah. Apabila melihat dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas akuntabilitas keuangan untuk kabupaten kota di Jawa Barat masuk kategori baik. Hal ini sesuai dengan prestasi yang diraih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui 2 kabupaten dan 2 kota yang masuk kategori sebagai kabupaten/kota yang memiliki prestasi laporan keuangan terbaik, kinerja ekonomi, dan kesejahteraan di daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil sebuah pemikiran yang mendasar mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dengan sistem akuntansi yang telah berjalan efektif akan menyebabkan pengendalian intern berjalan semakin baik sehingga diharapkan dapat memunculkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, dan tentu saja hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

5. Penutup

5.1. Simpulan



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk kategori baik. Tingkat keeratan hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti. Begitu juga dengan kualitas akuntabilitas keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk kategori baik.

Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

5.2. Implikasi dan Saran

Melakukan perbaikan yang sangat **intensif** atas tata kelola **laporan keuangan** pemerintah daerah dan bersungguh-sungguh menerapkan dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang terbaik di seluruh jajarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga dapat diharapkan tidak muncul lagi opini disclaimer dari BPK atas laporan keuangan pemerintah tahun-tahun



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

berikutnya. Untuk itu pemerintah perlu menyempurnakan dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan secara konsisten.

Daftar Referensi

- Aribowo, Fajar. 2007. *Laporan Keuangan Daerah Perlu Akuntabilitas*. Harian Bisnis Indonesia. 19 November 2007.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Cetakan I. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gillespie, Cecil, 1985. *Accounting System, Procedures and Methods*. Prentice_Hall Inc. Englewood Cliffs
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hall, James A. 2004. *Accounting Information Systems*. South-Western, Thomson.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2004. *Membangun Akuntabilitas Publik Keuangan Negara*. Media Akuntansi 39/April/Tahun XI/2004, Hal 12.
- Mohamad, Ismail dkk. 2004. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Edisi kedua. <http://www.lan.go.id>
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

Nurhayati, Isnaeni. 2004. *Pengaruh penerapan SAI dan SAKIP terhadap kelayakan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*. UNPAD, Tesis.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

_____. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. PERMENDAGRI Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

_____. PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surya, An Nissa Sumunar. 2004. *Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*. Skripsi. Universitas Padjadjaran.

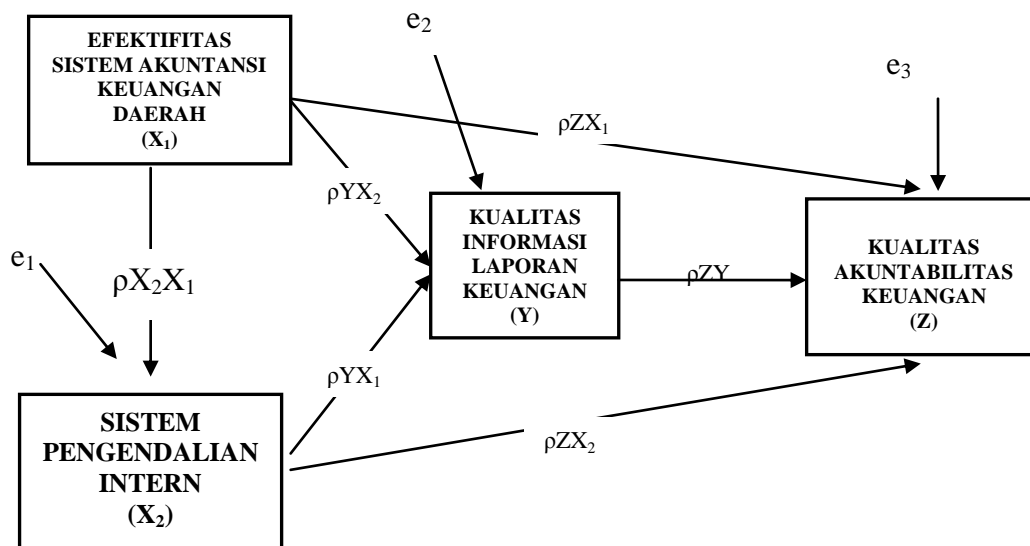
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah .2002. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Buku 1*.

Warren, S.Carl., and Reeve, M.James., and Fess, E.Philip. 2005. *Corporate Financial Accounting*. South Western: Thomson.

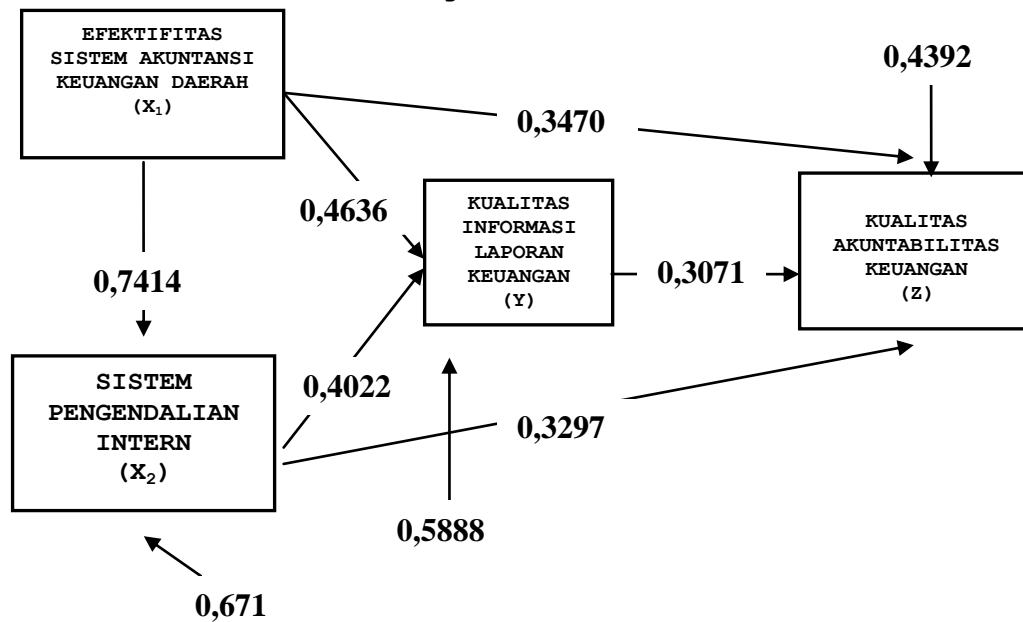
Weygandt, J.J., et al. (2005). *Accounting principles*. New York: John Wiley & Sons

LAMPIRAN

Gambar 1
Analisis Jalur (Path Analysis)



Gambar 2
Hubungan Antar Variabel



Tabel 1
Populasi Penelitian

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Bogor	14	Kabupaten Purwakarta
2	Kabupaten Sukabumi	15	Kabupaten Karawang
3	Kabupaten Cianjur	16	Kabupaten Bekasi
4	Kabupaten Bandung	17	Kota bogor
5	Kabupaten Garut	18	Kota Sukabumi
6	Kabupaten Tasikmalaya	19	Kota Bandung
7	Kabupaten Ciamis	20	Kota Cirebon
8	Kabupaten Kuningan	21	Kota Bekasi
9	Kabupaten Cirebon	22	Kota Depok
10	Kabupaten Majalengka	23	Kota Cimahi

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

11	Kabupaten Sumedang	24	Kota Tasikmalaya
12	Kabupaten Indramayu	25	Kota Banjar
13	Kabupaten Subang	26	Kabupaten Bandung Barat

Sumber: www.jabar.go.id

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Butir Pertanyaan
Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁) (Indra Bastian, 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006)	Asas Umum Pelaksanaan Anggaran Setelah Disahkan	- Penerimaan SKPD yang berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama satu hari kerja	Ordinal	A1
		- Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja	Ordinal	A2
		- Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD	Ordinal	A3
		- Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan selain dari yang telah ditetapkan dalam APBD	Ordinal	A4
	Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah	- Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah	Ordinal	A5
		- Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Ordinal	A6
		- SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah	Ordinal	A7
		- Pengembalian kelebihan pendapatan dibebankan pada belanja tidak terduga dengan didukung bukti yang lengkap dan sah.	Ordinal	A8
	Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah	- Setiap bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.	Ordinal	A9
		- Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan perda tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.	Ordinal	A10
	Prosedur Pelaksanaan	- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk	Ordinal	A11

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Butir Pertanyaan
	Anggaran Pembiayaan Daerah	menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya digunakan untuk mendana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung - Pembentukan dana cadangan dalam rekening tersendiri	Ordinal Ordinal	A12 A13
Sistem Pengendalian Intern (X ₂) (COSO; Indra Bastian, 2006 ; PP No. 60 Th 2008;)	Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Pendapatan	- Penggunaan surat tanda setoran yang telah diotorisasi dan diperiksa oleh fungsi penerima untuk setiap penyetoran pendapatan pajak - Pengecekan secara acak setiap SKPD atau SKRD yang masuk, apakah nilai yang tertera sama dengan nilai uang yang disetorkan. - Pengecekan apakah setiap pencatatan atas transaksi pendapatan telah dilandasi bukti pendukung yang lengkap. - Pengecekan secara independen terhadap posting transaksi- transaksi pendapatan ke dalam catatan akuntansi.	Ordinal Ordinal Ordinal	B1 B2 B3 B4
	Kegiatan Pengendalian Sistem Akuntansi Belanja/Biaya	- Dalam transaksi belanja harus ada otorisasi umum dan khusus, terutama untuk setiap pembelian - Setiap surat pesanan pembelian harus didasarkan pada surat permintaan yang telah diotorisasi - Setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat pesanan pembelian yang telah diotorisasi - Bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah - Setiap pencatatan ke register buku kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. - Pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercetak. - Panduan akun dan tinjauan terhadap pemberian kode akun - Peninjauan kinerja secara periodik	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) (SAP)	Relevan	- Memiliki manfaat umpan balik - Memiliki manfaat prediktif - Tepat waktu - Lengkap	Ordinal	C1, C2, C3, C4
	Andal	- Penyajian jujur - Dapat diverifikasi - Netralitas	Ordinal	C5, C6, C7
	Dapat dibandingkan	- Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode	Ordinal	C8, C9

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	No. Butir Pertanyaan
		- Identifikasi kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja dalam suatu organisasi.		
	Dapat dipahami	- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna - dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	Ordinal	C10, C11
Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Z) (Ismail Muhamad, 2004: 43)	pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	- Pengungkapan sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi - Pengungkapan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan - Pengungkapan sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dengan realisasi anggaran tahun lalu - Penyampaian akuntabilitas kinerja keuangan tepat waktu	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	D1 D2 D3 D4
	penilaian kinerja keuangan	- Penilaian kinerja keuangan dari aspek kehematan penggunaan sumber dana - Penilaian kinerja keuangan dari aspek efisiensi penggunaan sumber dana - Penilaian kinerja keuangan dari aspek efektifitas penggunaan sumber dana - Penilaian atas pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun.	Ordinal	D5, D6, D7, D8
	sistem informasi yang handal	- data keuangan yang disajikan bebas dari kesalahan material - data keuangan yang disajikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. - dalam penyajian data keuangan terdapat netralitas dalam pengungkapan.	Ordinal	D9, D10, D11
	Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen	- Adanya penilaian yang objektif dan independen terhadap akuntabilitas kinerja keuangan - tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas	Ordinal	D12, D13

Tabel 3
Profil Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Wanita	2	7,7
Pria	24	92,3
Usia		
20 - 30 tahun	0	0
31 - 40 tahun	4	15,38
> 40 tahun	22	84,62
Pendidikan		
D3	0	0
S1	9	34,62
S2	16	61,54
S3	1	3,85
Lama bekerja/jabatan		
1 - 2 tahun	5	19,23
3 - 4 tahun	10	38,46
5 - 6 tahun	8	30,77
> 6 tahun	2	7,69

Tabel 4
Uji Validitas
Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

No Item	t _{hitung}	t _{tabel}	Validitas	Ket
Item 01	2,471	2,064	Valid	Dipakai
Item 02	2,224	2,064	Valid	Dipakai
Item 03	2,241	2,064	Valid	Dipakai
Item 04	2,367	2,064	Valid	Dipakai
Item 05	2,903	2,064	Valid	Dipakai
Item 06	2,272	2,064	Valid	Dipakai
Item 07	2,243	2,064	Valid	Dipakai
Item 08	2,864	2,064	Valid	Dipakai
Item 09	2,399	2,064	Valid	Dipakai
Item 10	2,652	2,064	Valid	Dipakai
Item 11	2,912	2,064	Valid	Dipakai
Item 12	2,920	2,064	Valid	Dipakai
Item 13	2,960	2,064	Valid	Dipakai

Variabel Sistem Pengendalian Intern (X₂)

No Item	t _{hitung}	t _{tabel}	Validitas	Ket
Item 1	2,923	2,064	Valid	Dipakai
Item 2	2,815	2,064	Valid	Dipakai
Item 3	3,137	2,064	Valid	Dipakai
Item 4	3,104	2,064	Valid	Dipakai
Item 5	3,252	2,064	Valid	Dipakai
Item 6	2,664	2,064	Valid	Dipakai
Item 7	3,031	2,064	Valid	Dipakai
Item 8	3,272	2,064	Valid	Dipakai
Item 9	3,251	2,064	Valid	Dipakai
Item 10	3,253	2,064	Valid	Dipakai
Item 11	1,875	2,064	Tidak Valid	Direvisi
Item 12	3,048	2,064	Valid	Dipakai

Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

No Item	t _{hitung}	t _{tabel}	Validitas	Ket
Item 1	3,076	2,064	Valid	Dipakai
Item 2	3,154	2,064	Valid	Dipakai
Item 3	2,886	2,064	Valid	Dipakai
Item 4	2,991	2,064	Valid	Dipakai
Item 5	2,546	2,064	Valid	Dipakai
Item 6	1,643	2,064	Valid	Direvisi
Item 7	2,085	2,064	Valid	Dipakai
Item 8	2,713	2,064	Valid	Dipakai
Item 9	3,155	2,064	Valid	Dipakai
Item 10	3,098	2,064	Valid	Dipakai
Item 11	2,811	2,064	Valid	Dipakai

Kualitas Akuntabilitas Keuangan (Z)

No Item	t _{hitung}	t _{tabel}	Validitas	Ket
Item 1	3,083	2,064	Valid	Dipakai
Item 2	3,161	2,064	Valid	Dipakai
Item 3	3,116	2,064	Valid	Dipakai
Item 4	3,097	2,064	Valid	Dipakai
Item 5	3,355	2,064	Valid	Dipakai
Item 6	3,320	2,064	Valid	Dipakai
Item 7	3,320	2,064	Valid	Dipakai
Item 8	2,384	2,064	Valid	Dipakai
Item 9	2,752	2,064	Valid	Dipakai

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Item 10	2,787	2,064	Valid	Dipakai
Item 11	2,787	2,064	Valid	Dipakai
Item 12	3,237	2,064	Valid	Dipakai

Tabel 5
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
	Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan		
1	Daerah	0,8685	Reliabel
2	Sistem Pengendalian Intern	0,9483	Reliabel
3	Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0,9026	Reliabel
4	Kualitas Akuntabilitas Keuangan	0,7949	Reliabel

Tabel 6
Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ESAKD	SPI	KILK	KAK
N		26	26	26	26
Normal Parameters(a,b)	Mean	38,87769	36,96947	34,28325	36,27702
	Std. Deviation	6,434891	4,723179	3,915209	6,367742
Most Extreme Differences	Absolute	,109	,118	,112	,120
	Positive	,109	,085	,112	,120
	Negative	-,090	-,118	-,108	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		,554	,602	,571	,611
Asymp. Sig. (2-tailed)		,919	,861	,900	,849

Tabel 7
ANOVA (b) Hipotesis Dua (H2)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250,363	2	125,181	21,671	,000(a)
	Residual	132,859	23	5,776		
	Total	383,222	25			

a Predictors: (Constant), PI, PSAKD

b Dependent Variabel: KILK

Tabel 8
Coefficients (a) Hipotesis Dua (H2)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,989	3,796		2,895	,008
	ESAKD	,282	,111	,464	2,534	,019
	PI	,333	,152	,402	2,198	,038

a Dependent Variabel: KILK

Tabel 9
ANOVA (b) Hipotesis Tiga (H3)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	818,108	3	272,703	30,673	,000(a)
	Residual	195,595	22	8,891		
	Total	1013,703	25			

a Predictors: (Constant), KILK, PI, ESAKD

b Dependent Variabel: KAK

Tabel 10
Coefficients (a) Hipotesis Tiga (H3)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,769	5,501		-1,958	,063
	ESAKD	,343	,156	,347	2,199	,039
	SPI	,414	,207	,307	2,000	,058
	KILK	,536	,259	,330	2,073	,050

a Dependent Variabel: KAK

Tabel 11
Rangkuman Hasil Koefisien Jalur

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur (Beta)	Nilai t	Nilai F	Hasil Pengujian	Koefisien Determinan R ² square	Koefisien Variabel Lain
X ₁ terhadap X ₂	0,7414	5,413	-	H ₁ diterima	0,54976 atau 54,98%	0,45024 atau 45,02%
X ₁ terhadap Y	0,4636	2,534	21,67088	H ₁ diterima	0,65331 atau 65,33%	0,34669 atau 34,67%
X ₂ terhadap Y	0,4022	2,199		H ₁ diterima		
X ₁ terhadap Z	0,3471	2,199	30,673	H ₁ diterima	0,8071 atau 80,71%	0,1929 atau 19,29%
X ₂ terhadap Z	0,3071	2,241		H ₁ diterima		
Y terhadap Z	0,3297	2,083		H ₁ diterima		

Tabel 12
Hasil Analisis Jalur

Pengaruh Variabel	Koefisien Jalur	Hubungan Kausal			
		Langsung	Tidak Langsung		Bersama-sama
			Melalui X ₂	Melalui Y	
X ₁ terhadap X ₂	0,7414	0,5498	-	-	-
ε ₁ terhadap X ₂	0,671	0,4502	-	-	-
X ₁ terhadap Y	0,4636	0,2149	0,1383	-	-
X ₂ terhadap Y	0,4022	0,1618	-	-	-
X ₁ dan X ₂ terhadap Y	-	-	-	-	0,6533
ε ₂ terhadap Y	0,5888	0,3467	-	-	-
X ₁ terhadap Z	0,3470	0,1204	-	0,0531	-
X ₂ terhadap Z	0,3297	0,2488	-	0,0407	-
Y terhadap Z	0,3071	0,2714			



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

X_1, X_2 dan Y terhadap Z	-	-	-	-	0,8070
E_3 terhadap Z	0,3297	0,1929	-	-	-

KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
.....(boleh tidak diisi)

Pilih salah satu dengan memberikan tanda silang (X) atau checklist (V)

2. Jenis Kelamin ? Pria Wanita

3. Usia ?
a. 20 - 30 tahun
b. 31 - 40 tahun
c. > 40 tahun

4. Kedudukan/Jabatan sekarang :

5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bekerja di bidang ini ? ... Th
a. 1-2
b. 3-4
c. 5-6
d. > 6

6. Pendidikan Terakhir : DIII /
Akademi Jurusan :
 S1 Jurusan :
 S2 Jurusan :
 S3 Jurusan :



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

EFEKTIFITAS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Petunjuk Pengisian: Lingkari salah satu jawaban atas pernyataan-pernyataan di bawah ini yang Bapak/Ibu anggap paling tepat.

Asas Umum Pelaksanaan Anggaran Setelah Disahkan

1. Menyetor ke rekening kas umum untuk setiap penerimaan SKPD paling lambat satu hari kerja
 - a) Tidak pernah dilaksanakan
 - b) Hampir tidak pernah dilaksanakan
 - c) Sebagian dilaksanakan
 - d) Hampir selalu dilaksanakan
 - e) Selalu dilaksanakan

2. Melakukan pengeluaran belanja melebihi pagu belanja yang dianggarkan dalam APBD
 - a) Selalu melebihi
 - b) Hampir selalu melebihi
 - c) Kadang-kadang melebihi
 - d) Hampir tidak pernah melebihi
 - e) Tidak pernah melebihi

3. Membebankan semua pengeluaran sesuai anggaran belanja yang tersedia dalam APBD
 - a) Seluruhnya tidak sesuai
 - b) Hampir seluruhnya tidak sesuai
 - c) Kadang-kadang sesuai
 - d) Hampir seluruhnya sesuai
 - e) Seluruhnya sesuai

4. Semua pengeluaran atas beban anggaran daerah dikeluarkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD
 - a) Seluruhnya tidak sesuai
 - b) Hampir seluruhnya tidak sesuai
 - c) Kadang-kadang sesuai
 - d) Hampir seluruhnya sesuai
 - e) Seluruhnya sesuai

Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

5. Semua pendapatan daerah diterima melalui rekening kas umum daerah
 - a) Seluruhnya tidak melalui
 - b) Hampir seluruhnya tidak melalui
 - c) Sebagian melalui
 - d) Hampir seluruhnya melalui
 - e) Seluruhnya melalui



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

6. Semua pendapatan yang diterima sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- Seluruhnya tidak didukung
 - Hampir seluruhnya tidak didukung
 - Sebagian didukung
 - Hampir seluruhnya didukung
 - Seluruhnya didukung
7. Semua pungutan telah ditetapkan dalam peraturan daerah
- belum ditetapkan seluruhnya
 - Hampir seluruhnya belum ditetapkan
 - Sebagian telah ditetapkan
 - Hampir seluruhnya telah ditetapkan
 - Seluruhnya telah ditetapkan
8. Membebaskan pada belanja tidak terduga untuk semua pengembalian kelebihan pendapatan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah.
- Tidak dilakukan seluruhnya
 - Hampir seluruhnya tidak dilakukan
 - Kadang-kadang
 - Hampir seluruhnya dilakukan
 - Seluruhnya dilakukan

Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

9. Semua bukti pengeluaran belanja atas beban APBD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- Seluruhnya tidak disahkan
 - Hampir seluruhnya tidak disahkan
 - Kadang-kadang
 - Sebagian besar telah disahkan
 - Seluruhnya telah disahkan
10. Semua pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, selalu berdasarkan perda tentang APBD yang ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- Seluruhnya tidak berdasarkan perda
 - Hampir seluruhnya tidak berdasarkan perda
 - Kadang-kadang
 - Sebagian besar berdasarkan perda
 - Seluruhnya berdasarkan perda

Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
 www.sna14aceh.com

11. Menutupi defisit anggaran dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- a) Seluruhnya tidak dilakukan
 - b) Hampir seluruhnya tidak dilakukan
 - c) Kadang-kadang
 - d) Hampir seluruhnya dilakukan
 - e) Seluruhnya dilakukan
12. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- a) Seluruhnya tidak dilakukan
 - b) Hampir seluruhnya tidak dilakukan
 - c) Kadang-kadang
 - d) Hampir seluruhnya dilakukan
 - e) Seluruhnya dilakukan
13. Membentuk rekening tersendiri untuk dana cadangan
- a) Seluruhnya tidak dilakukan
 - b) Hampir seluruhnya tidak dilakukan
 - c) Kadang-kadang
 - d) Hampir seluruhnya dilakukan
 - e) Seluruhnya dilakukan

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Mohon Bp/Ibu/Sdr memberi tanda silang (x) pada salah satu skala 1 sampai 5 yang tersedia pada kolom di samping pertanyaan untuk menunjukkan seberapa sering instansi Bp/Ibu/Sdr melaksanakan hal-hal berikut:

Keterangan pilihan:

- 1) Seluruhnya tidak dilakukan
- 2) Hampir seluruhnya tidak dilakukan
- 3) Kadang-kadang
- 4) Hampir seluruhnya dilakukan
- 5) Seluruhnya dilakukan

Pertanyaan yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
KEGIATAN PENGENDALIAN SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN						
Apakah Pimpinan Instansi Pemerintah pada setiap tingkat telah:						

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
 www.sna14aceh.com

1.	Menggunakan surat tanda setoran yang telah diotorisasi dan diperiksa oleh fungsi penerima untuk setiap penyetoran pendapatan pajak	1	2	3	4	5
2.	Mengecek secara acak setiap SKPD atau SKRD yang masuk, apakah nilai yang tertera sama dengan nilai uang yang disetorkan.	1	2	3	4	5
3.	Mengecek apakah setiap pencatatan atas transaksi pendapatan telah dilandasi bukti pendukung yang lengkap.	1	2	3	4	5
4.	Mengecek secara independen terhadap posting transaksi-transaksi pendapatan ke dalam catatan akuntansi	1	2	3	4	5
KEGIATAN PENGENDALIAN SISTEM AKUNTANSI BELANJA/BIAYA						
Apakah Pimpinan Instansi Pemerintah pada setiap tingkat telah:						
5.	Mengotorisasi transaksi belanja, terutama untuk setiap pembelian	1	2	3	4	5
6.	Mendasarkan pada surat permintaan yang telah diotorisasi untuk setiap surat pesanan pembelian	1	2	3	4	5
7.	Setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat pesanan pembelian yang telah diotorisasi.	1	2	3	4	5
8.	Melampirkan dokumen pendukung yang lengkap dan sah untuk setiap bukti kas keluar	1	2	3	4	5
9.	Menyertakan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap untuk setiap pencatatan ke register buku kas keluar	1	2	3	4	5
10.	Mempertanggungjawabkan secara periodik semua formulir bernomorurut cetak	1	2	3	4	5
11.	Melakukan peninjauan terhadap pemberian kode akun berdasarkan panduan akun.	1	2	3	4	5
12.	Melakukan peninjauan kinerja secara periodik	1	2	3	4	5

KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
www.sna14aceh.com

Mohon Bp/Ibu/Sdr memberi tanda silang (x) pada salah satu skala 1 sampai 5 yang tersedia pada kolom di samping pertanyaan untuk menunjukkan seberapa sering laporan keuangan instansi Bp/Ibu/Sdr memuat informasi hal-hal berikut:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tidak
pernah

Selalu

KETERANGAN

Semakin besar angka berarti semakin berkualitas

Menurut anda sejauh mana kualitas informasi laporan keuangan di instansi Anda.

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
RELEVAN						
1.	Menggunakan informasi laporan keuangan yang dihasilkan sebagai alat evaluasi dan koreksi atas kegiatan di masa lalu untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya.	1	2	3	4	5
2.	Menjadikan informasi dalam Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya	1	2	3	4	5
3.	Menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.	1	2	3	4	5
4.	Mengungkap dengan jelas informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan	1	2	3	4	5
ANDAL						
5.	Menyesuaikan semua pencatatan atas pengeluaran/ belanja dengan jumlah uang yang digunakan dan didukung bukti transaksi.	1	2	3	4	5
6.	Hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak berbeda dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.	1	2	3	4	5
7.	Menyajikan setiap informasi dalam laporan keuangan yang ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pihak-pihak tertentu.	1	2	3	4	5
DAPAT DIBANDINGKAN						

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
 www.sna14aceh.com

8.	Menyajikan dan mengklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten.	1	2	3	4	5
9.	Mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran.	1	2	3	4	5
DAPAT DIPAHAMI						
10.	menyajikan dalam laporan keuangan, perbandingan kinerja antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya.	1	2	3	4	5
11.	Menampilkan dalam bentuk tabel, diagram ataupun grafik, hasil kinerja pemerintah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.	1	2	3	4	5

KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Mohon Bp/Ibu/Sdr memberi tanda silang (x) pada salah satu skala 1 sampai 5 yang tersedia pada kolom di samping pertanyaan untuk menunjukkan seberapa banyak instansi Bp/Ibu/Sdr mengungkap hal-hal berikut:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Tidak pernah

Selalu

KETERANGAN

Semakin besar angka berarti menunjukkan kualitas akuntabilitas keuangan semakin baik.

Pertanyaan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja keuangan Pemda

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan						
1.	Mengungkap sebab-sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realisasinya	1	2	3	4	5
2.	Mengungkap adanya ketidaktercapaian target-target yang telah ditetapkan	1	2	3	4	5

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XIV ACEH 2011
 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
 www.sna14aceh.com

3	Mengungkap sebab-sebab adanya perbedaan realisasi anggaran tahun sekarang dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun lalu	1	2	3	4	5
4	Menyampaikan pertanggungjawaban Laporan Realisasi Anggaran secara tepat waktu	1	2	3	4	5
Penilaian kinerja keuangan						
5.	Mengungkap realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu dihubungkan dengan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut.	1	2	3	4	5
6.	Mengungkap realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu dihubungkan dengan tingkat ketercapaian tujuan kegiatan tersebut.	1	2	3	4	5
... 7.	Mengungkap pencapaian tujuan yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut dari tahun ke tahun	1	2	3	4	5
Sistem informasi yang handal						
8.	Menyajikan data keuangan yang bebas dari kesalahan material	1	2	3	4	5
9.	Menyajikan data keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	1	2	3	4	5
10.	Netralitas dalam pengungkapan penyajian data keuangan	1	2	3	4	5
Akuntabilitas kinerja keuangan dinilai secara objektif dan independen						
11.	Menilai secara objektif dan independen terhadap pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran keuangan	1	2	3	4	5
12.	Menindaklanjuti laporan penilaian atas pertanggungjawaban laporan realisasi anggaran	1	2	3	4	5